



Analisis Ancaman Berdasarkan Perkembangan Lingkungan Strategis ALKI II Dengan Pendekatan NKKK, Dime-Fil, Ahp dan Swot

Bungkus Prasajo Subagio

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL), Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 01, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 29, 2025

Available online November 29, 2025

Kata Kunci :

ALKI II, NKKK, DIME-FIL, Sea Power, AHP, SWOT, Keamanan Maritim

Keywords:

ALKI II, NKKK, DIME-FIL, Sea Power, AHP, SWOT, Maritime Security



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Bungkus Prasajo Subagio. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) adalah jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini vital bagi perdagangan dunia, tetapi sekaligus rawan ancaman seperti rivalitas geopolitik, illegal fishing, penyelundupan, dan terorisme maritim. Penelitian ini bertujuan menganalisis ancaman ALKI II dengan menggunakan kerangka Niat, Kemampuan, Kondisi, dan Kerawanan (NKKK), instrumen kekuatan nasional (DIME-FIL), konsep Sea Power A.T. Mahan, metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dan analisis SWOT. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan kuantitatif AHP. Data primer berasal dari wawancara ahli dan dokumen pertahanan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik dan regulasi. Analisis dilakukan melalui tahapan: identifikasi ancaman (NKKK), pemetaan instrumen nasional (DIME-FIL), analisis kekuatan maritim (Sea Power), prioritas ancaman (AHP), dan formulasi strategi (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia menempati peringkat ancaman tertinggi (0,3746), disusul Amerika Serikat (0,3642), dan Australia (0,2612). Analisis SWOT menempatkan ALKI II pada Kuadran II (Strength-Threats), sehingga strategi yang tepat adalah defensif-aktif dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa penguatan ALKI II tidak hanya mengandalkan militer, tetapi juga menuntut diplomasi maritim, modernisasi armada, penegakan hukum, pengembangan industri maritim, serta penguatan budaya maritim. Strategi komprehensif ini memungkinkan Indonesia memperkuat kedaulatannya sekaligus mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia.

ABSTRACT

The Indonesian Archipelagic Sea Lane II (ALKI II) is a strategic maritime passage linking the Indian and Pacific Oceans. Its position is vital for global trade but also vulnerable to threats such as geopolitical rivalry, illegal fishing, smuggling, and maritime terrorism. This study aims to analyze threats in ALKI II using the Intention, Capability, Condition, and Vulnerability (NKKK) framework, national power instruments (DIME-FIL), A.T. Mahan's Sea Power concept, the Analytical Hierarchy Process (AHP), and SWOT analysis. This research employed a qualitative descriptive approach supported by quantitative AHP. Primary data were obtained from expert interviews and defense documents, while secondary data were collected from academic literature and regulations. The analysis followed five stages: threat identification (NKKK), mapping of national instruments (DIME-FIL), maritime power analysis (Sea Power), threat prioritization (AHP), and strategic formulation (SWOT). The findings reveal that Malaysia represents the highest threat priority (0.3746), followed by the United States (0.3642), and Australia (0.2612). SWOT analysis places ALKI II in Quadrant II (Strength-Threats), indicating that the most suitable strategy is defensive-active, leveraging internal strengths to counter external threats. The study concludes that strengthening ALKI II cannot rely solely on military power but requires maritime diplomacy, naval modernization, law enforcement, maritime industry development, and the strengthening of maritime culture. Such a comprehensive strategy enables Indonesia to safeguard its sovereignty while advancing its vision as a global maritime fulcrum.

*Corresponding author

E-mail addresses: Prassubagio@gmail.com (Bungkus Prasajo Subagio)

1. PENDAHULUAN

Indonesia dianugerahi posisi geografis yang unik dan strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan sekadar pemisah antar pulau, tetapi juga menjadi perekat dan jalur vital yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Salah satu jalur laut yang sangat penting adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Jalur ini setiap hari dilalui oleh kapal dagang maupun militer dari berbagai negara, menjadikannya salah satu titik krusial dalam arus perdagangan global.

Namun, posisi yang strategis ini menghadirkan dilema. Di satu sisi, ALKI II adalah peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai poros maritim dunia. Di sisi lain, jalur ini rentan terhadap ancaman, baik tradisional seperti rivalitas geopolitik dan potensi konflik antarnegara, maupun non-tradisional seperti *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan, hingga terorisme maritim. Ancaman ini tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan, tetapi juga berpotensi merugikan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir dengan menggunakan pendekatan Niat, Kemampuan, Kondisi, dan Kerawanan (NKKK) untuk mengidentifikasi ancaman; DIME-FIL untuk memetakan instrumen kekuatan nasional; konsep *Sea Power* A.T. Mahan untuk menegaskan arti penting armada dan industri maritim; metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan prioritas ancaman; serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang tepat.

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika ancaman di ALKI II dan menawarkan strategi pertahanan maritim yang aplikatif. Dengan analisis yang komprehensif, Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman sekaligus mengoptimalkan peluang, sehingga ALKI II benar-benar menjadi jalur yang aman, damai, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan kuantitatif *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pendekatan ini dipilih karena masalah keamanan maritim di ALKI II memiliki kompleksitas yang tidak hanya dapat dijelaskan dengan angka semata, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika politik, ekonomi, hukum, dan militer yang menyertainya. Oleh sebab itu, analisis kualitatif digunakan untuk memahami konteks, sementara AHP digunakan untuk memberikan bobot prioritas secara kuantitatif terhadap jenis ancaman dan aktor yang paling dominan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ALKI II dan wilayah sekitarnya. Jalur ini dipilih karena merupakan alur laut internasional yang dilewati kapal-kapal dagang dan militer berbagai negara, sehingga menjadi ruang strategis sekaligus rentan terhadap ancaman keamanan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kepentingan aktor negara maupun non-negara berinteraksi di jalur ini dan bagaimana Indonesia menyiapkan strategi pengamanannya.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber. Pertama, data primer, yang mencakup hasil wawancara dengan pakar pertahanan, praktisi keamanan maritim, serta telaah dokumen pertahanan negara. Kedua, data sekunder, yang berasal dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Penggunaan kedua sumber data ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Tahapan penelitian dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, yaitu:

- a. Identifikasi Ancaman (NKKK), Ancaman dipetakan berdasarkan Niat, Kemampuan, Kondisi, dan Kerawanan, sehingga diperoleh gambaran siapa aktornya, apa motivasinya, serta di mana titik kerentanan Indonesia berada.
- b. Pemetaan Instrumen Kekuatan Nasional (DIME-FIL), Ancaman yang sudah teridentifikasi kemudian dipetakan dengan mengkaji kemampuan Indonesia dalam

merespons, melalui diplomasi, informasi, militer, ekonomi, keuangan, intelijen, dan penegakan hukum.

- c. Analisis Kekuatan Maritim (Sea Power), Konsep Sea Power A.T. Mahan digunakan untuk menilai posisi maritim Indonesia, khususnya pada aspek armada, pangkalan, dan industri maritim yang menopang kekuatan laut.
- d. Prioritas Ancaman (AHP), Metode AHP digunakan untuk memberikan bobot dan menentukan urutan prioritas ancaman, sehingga kebijakan keamanan dapat difokuskan pada isu paling mendesak.
- e. Formulasi Strategi (SWOT), Hasil analisis NKKK, DIME-FIL, Sea Power, dan AHP diintegrasikan melalui analisis SWOT.

Dengan tahapan tersebut, metode penelitian ini tidak hanya mampu menjelaskan ancaman secara deskriptif, tetapi juga menghasilkan prioritas dan strategi penguatan keamanan maritim yang aplikatif dan berorientasi kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis NKKK (Niat, Kemampuan, Kondisi dan Kerawanan)

Analisis ancaman di ALKI II pertama-tama dilakukan dengan kerangka Niat, Kemampuan, Kondisi, dan Kerawanan (NKKK). Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa sebuah ancaman tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari rangkaian kepentingan, kapasitas, situasi lingkungan, serta celah kelemahan yang bisa dimanfaatkan.

Niat (Intention)

Niat aktor negara maupun non-negara untuk beraktivitas di ALKI II didorong oleh kepentingan strategis. Negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki niat menjaga jalur logistik dan proyeksi kekuatan militer. Malaysia memiliki niat mempertahankan kepentingan ekonominya, khususnya perikanan, yang seringkali meluas hingga memasuki wilayah Indonesia. Di sisi lain, aktor non-negara seperti sindikat penyelundupan dan jaringan *illegal fishing* juga memiliki niat mencari keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan celah pengawasan di jalur laut ini.

Kemampuan (Capability)

Niat yang ada dapat terealisasi jika aktor memiliki kemampuan yang memadai. Negara besar memiliki armada laut modern, teknologi satelit, dan sumber daya finansial yang mendukung. Malaysia, meskipun skala kekuatannya lebih kecil, tetap memiliki kemampuan nyata melalui kehadiran nelayan, kapal patroli, dan kedekatan geografis. Aktor non-negara juga memiliki kemampuan, terutama dalam bentuk jaringan logistik, modal finansial, serta pengalaman memanfaatkan celah keamanan.

Kondisi (Condition)

Lingkungan strategis di Indo-Pasifik menciptakan kondisi yang memperkuat munculnya ancaman di ALKI II. Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat meningkatkan intensitas lalu lintas kapal perang, yang berimplikasi pada keamanan kawasan. Kondisi domestik Indonesia, seperti keterbatasan alutsista dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi, membuat pengawasan ALKI II masih menghadapi tantangan besar.

Kerawanan (Vulnerability)

Kerawanan utama Indonesia di ALKI II adalah luasnya wilayah laut yang tidak sebanding dengan kemampuan patroli. Armada terbatas, infrastruktur pangkalan belum merata, dan lemahnya koordinasi antarinstansi membuat jalur ini rentan dieksploitasi. Di samping itu, aspek penegakan hukum yang belum konsisten sering kali tidak memberikan efek jera, sehingga kejahatan maritim mudah berulang.

Melalui analisis NKKK, kita dapat memahami bahwa ancaman di ALKI II bukanlah sekadar bayangan, melainkan realitas yang berakar pada kepentingan dan kapasitas aktor, diperkuat oleh kondisi lingkungan strategis, serta dipermudah oleh kerentanan domestik. Jika kerawanan ini dibiarkan, maka yang hilang bukan hanya sumber daya laut, melainkan juga martabat dan kedaulatan bangsa. Karena itu, NKKK memberi pesan penting: ancaman hanya bisa dihadapi jika niat aktor dibaca dengan baik, kemampuan dipetakan secara cermat, kondisi dikendalikan, dan kerawanan ditutup dengan strategi yang tepat.

Analisis DIME-FIL (Diplomacy, Information, Military, Economy, Financial, Intelligence, Law Enforcement)

Pendekatan DIME-FIL merupakan holistik kekuatan nasional yang holistik untuk menghadapi ancaman di ALKI II. Analisis ini menekankan bahwa kedaulatan laut tidak dapat dijaga hanya dengan kekuatan militer, melainkan perlu sinergi diplomasi, informasi, ekonomi, keuangan, intelijen, dan penegakan hukum. Dengan demikian, pengamanan ALKI II adalah tanggung jawab kolektif bangsa.

Diplomasi (Diplomacy)

Diplomasi maritim adalah instrumen utama untuk menjaga stabilitas ALKI II. Melalui forum ASEAN, IORA, maupun IMO, Indonesia dapat memperkuat pengakuan internasional terhadap kedaulatan jalur lautnya. Diplomasi juga menjadi sarana untuk meredam ketegangan akibat rivalitas geopolitik, sehingga ALKI II tetap berfungsi sebagai jalur damai. Diplomasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah, tetapi juga melalui diplomasi pertahanan dan kerja sama antarangkatan laut negara sahabat.

Informasi (Information)

Informasi merupakan senjata penting dalam deteksi dini ancaman. Penguatan sistem informasi dan komunikasi maritim, termasuk radar, satelit, serta pusat data terpadu, memungkinkan Indonesia mengawasi pergerakan kapal secara real-time. Selain itu, informasi juga penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang arti penting ALKI II, agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari pengawas keamanan laut.

Militer (Military)

Kekuatan militer, khususnya TNI AL, tetap menjadi tulang punggung dalam menjaga kedaulatan. Patroli rutin, latihan gabungan, serta modernisasi alutsista adalah bentuk nyata kehadiran negara di laut. Namun, militer tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus dilihat sebagai elemen pendukung dari orkestrasi kekuatan nasional yang lebih luas.

Ekonomi (Economy)

ALKI II adalah jalur vital perdagangan dunia. Stabilitas keamanan di jalur ini berimplikasi langsung pada ketahanan ekonomi nasional. Gangguan di ALKI II akan

berdampak pada arus logistik, energi, dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, menjaga keamanan ALKI II berarti menjaga denyut ekonomi bangsa.

Keuangan (*Financial*)

Kekuatan keuangan menentukan sejauh mana strategi dapat diimplementasikan. Alokasi anggaran pertahanan maritim harus sepadan dengan luasnya wilayah yang dijaga. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting agar tidak terjadi kebocoran yang melemahkan sistem pertahanan.

Intelejen (*Intelligence*)

Intelijen adalah “mata dan telinga” negara di laut. Dengan intelijen yang tajam, Indonesia dapat membaca niat dan kemampuan aktor asing sebelum ancaman benar-benar muncul. Intelijen maritim juga penting untuk memantau jaringan kejahatan transnasional, sehingga dapat dicegah sebelum masuk lebih jauh ke wilayah Indonesia.

Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Instrumen terakhir, tetapi sangat menentukan, adalah penegakan hukum. Tanpa hukum yang kuat, berbagai kejahatan maritim seperti illegal fishing dan penyelundupan akan terus berulang. Supremasi hukum hanya dapat terwujud melalui sinergi TNI AL, Bakamla, Polair, KKP, dan Bea Cukai. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten akan menutup ruang bagi aktor yang mencoba melemahkan kedaulatan Indonesia.

Analisis DIME-FIL menunjukkan bahwa keamanan ALKI II bukan sekadar urusan militer, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif bangsa. Diplomasi menjaga hubungan baik, informasi membuka mata bangsa, militer menjaga kedaulatan, ekonomi memberi alasan untuk bertahan, keuangan menyediakan sumber daya, intelijen mendeteksi niat musuh, dan hukum menutup celah kerawanan. Jika semua instrumen ini bergerak serentak, maka ALKI II tidak hanya aman, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia.

Analisis *Sea Power* AT. Mahan

Konsep *Sea Power* yang diperkenalkan oleh Alfred Thayer Mahan menegaskan bahwa kejayaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya menguasai laut. Laut bukan hanya jalur pelayaran, tetapi juga ruang strategis yang menopang perdagangan, logistik, sumber daya, dan pengaruh politik global. Dalam konteks Indonesia, khususnya ALKI II, pemikiran Mahan menjadi sangat relevan.

ALKI II adalah jalur yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga setiap kapal niaga maupun militer yang melintas di kawasan Indo-Pasifik hampir pasti melalui jalur ini. Posisi geografis ini sejalan dengan pandangan Mahan bahwa letak strategis suatu negara menentukan nilai maritimnya. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan maritim utama, sekaligus menghadapi ancaman dari aktor negara yang ingin memanfaatkan jalur ini untuk kepentingannya sendiri.

Lebih jauh, Mahan menekankan pentingnya armada laut yang kuat. Armada tidak hanya menjadi instrumen pertahanan, tetapi juga simbol kekuatan bangsa. Bagi Indonesia, keberadaan TNI AL dengan kapal perang modern, kapal patroli, dan kapal bantu adalah syarat mutlak untuk menunjukkan eksistensi negara di laut. Armada yang tangguh mampu mengamankan ALKI II dari berbagai ancaman, mulai dari *illegal fishing* hingga proyeksi kekuatan militer asing.

Selain armada, Mahan juga menyoroti infrastruktur pendukung, seperti pangkalan laut, pelabuhan, dan jalur komunikasi. Tanpa pangkalan yang memadai, armada tidak bisa bertahan lama di laut. Oleh karena itu, pembangunan pangkalan di titik-titik strategis ALKI II misalnya

di Sulawesi dan Nusa Tenggara menjadi bagian penting dari strategi keamanan maritim. Infrastruktur ini akan memperkuat daya jangkauan sekaligus meningkatkan respons cepat terhadap potensi ancaman.

Tidak kalah penting, *Sea Power* juga berbicara tentang kapasitas industri maritim. Galangan kapal, logistik laut, dan ekonomi berbasis maritim adalah fondasi yang menopang kekuatan laut secara berkelanjutan. Indonesia perlu memperkuat industri pertahanan maritim dan *blue economy* untuk memastikan bahwa penguasaan ALKI II tidak hanya didukung oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh basis ekonomi yang kokoh.

Konsep *Sea Power* Mahan memberikan pesan bahwa laut adalah ruang hidup yang menentukan masa depan bangsa. Bagi Indonesia, menjaga ALKI II tidak hanya soal patroli atau alutsista, tetapi tentang memastikan bahwa laut menjadi kekuatan strategis dan sumber kesejahteraan rakyat. Jika Indonesia mampu menguasai ALKI II dengan armada yang kuat, pangkalan yang memadai, dan industri maritim yang mandiri, maka bangsa ini tidak hanya dihormati di kawasan, tetapi juga disegani di dunia. Sebaliknya, jika laut diabaikan, kedaulatan dan martabat bangsa bisa dengan mudah digerus oleh kepentingan asing.

Analisis Analytical Hierarchy Process (AHP)

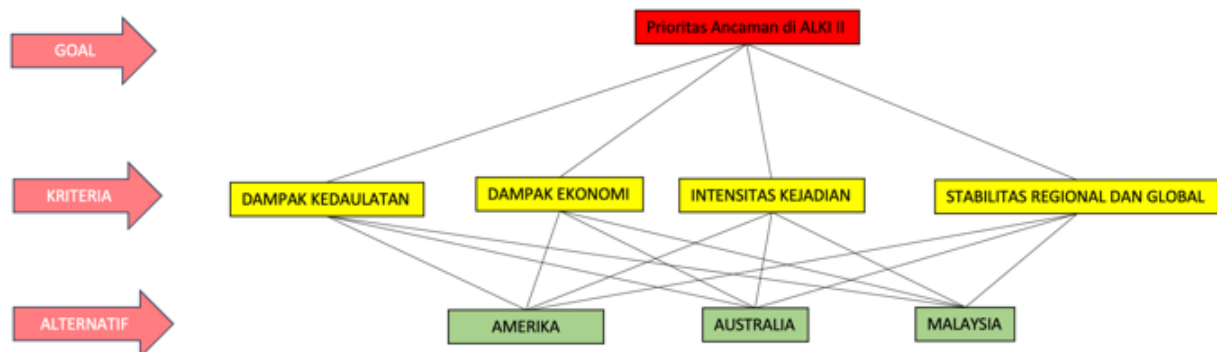
Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas ancaman utama di ALKI II, sehingga strategi penguatan keamanan dapat difokuskan pada isu yang paling mendesak. Pendekatan AHP memungkinkan pengambilan keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, membandingkan alternatif ancaman, serta menghasilkan bobot prioritas yang konsisten.

1) Kriteria Penilaian, Empat kriteria ditetapkan untuk menilai ancaman di ALKI II, yaitu:

- Dampak terhadap kedaulatan nasional (K1)
- Dampak ekonomi (K2)
- Intensitas kejadian (K3)
- Dampak terhadap stabilitas regional dan global (K4)

2) Alternatif **Ancaman** **(State Actor)**
Tiga aktor negara dipilih sebagai alternatif yang paling relevan berdasarkan dinamika strategis kawasan:

- P1 = Amerika Serikat
- P2 = Australia
- P3 = Malaysia



Gambar 1. Visualisasi AHP (olahan Peneliti)

Dampak Kedaulatan	P1	P2	P3	Norm	P1	P2	P3	weight (W)	feigen	rasio
P1	1	2,00	0,5	P1	0,2857143	0,3333333	0,2727322	0,29725995	0,8942935	3,0084562
P2	0,5	1	0,3333	P2	0,1428571	0,1666667	0,1818033	0,163775705	0,4920425	3,0043681
P3	2	3,00	1	P3	0,5714286	0,5	0,5454645	0,538964345	1,6248114	3,0146917
jumlah	3,5	6	1,8333	jumlah	1	1	1	1	average	3,009172
P3 lebih penting 2x dari P1									CI	0,004586
P3 lebih penting 3x dari P2									CR	0,0079068 < 0,1 konsisten
P1 lebih penting 2x dari P2										
Dampak ekonomi	P1	P2	P3	Norm	P1	P2	P3	weight (W)	feigen	rasio
P1	1	2	3	P1	0,5454545	0,5714286	0,5	0,538961039	1,6248196	3,0147256
P2	0,5	1	2,00	P2	0,2727273	0,2857143	0,3333333	0,297258297	0,8943001	3,0084951
P3	0,33333333	0,5	1	P3	0,1818182	0,1428571	0,1666667	0,163780664	0,4920635	3,0044053
jumlah	1,83333333	3,5	6	jumlah	1	1	1	1	average	3,0092087
P1 dampak ekonomi 2x dari P2									CI	0,0046043
P1 dampak ekonomi 3x dari P3									CR	0,0079185 < 0,1 konsisten
P2 dampak ekonomi 2x dari P3										
Intensitas kejadian	P1	P2	P3	Norm	P1	P2	P3	weight (W)	feigen	rasio
P1	1,00	0,50	2,00	P1	0,2857	0,2727	0,3333	0,2973	0,8943	3,0085
P2	2,00	1,00	3,00	P2	0,5714	0,5455	0,5000	0,5390	1,6248	3,0147
P3	0,50	0,33	1,00	P3	0,1429	0,1818	0,1667	0,1638	0,4921	3,0044
jumlah	3,5000	1,83333333	6	jumlah	1	1	1	1	average	3,0092
P3 lebih penting 2x dari pada P1									CI	0,0046
P3 lebih penting 3x dari pada P2									CR	0,0079 < 0,1 konsisten
P1 lebih penting 2x dari pada P2										
stabilitas regional &	P1	P2	P3	Norm	P1	P2	P3	weight (W)	feigen	rasio
P1	1	2	0,5	P1	0,2857	0,3333	0,2727	0,2973	0,8943	3,0085
P2	0,5000	1	0,33	P2	0,1429	0,1667	0,1818	0,1638	0,4920	3,0044
P3	2,00	3	1	P3	0,5714	0,5000	0,5455	0,5390	1,6248	3,0147
jumlah	3,50	6,00	1,83	jumlah	1	1	1	1	average	3,0092
P2 lebih sering 2x dari pada P1									CI	0,0046
P2 lebih sering 3x dari pada P3									CR	0,0079 < 0,1 konsisten
P1 lebih sering 2x dari pada P3										

Gambar 2 Perhitungan Bobot dan Kriteria AHP (olahan peneliti)

HASIL PERBANDINGAN ANTAR KRITERIA					Norm	K1	K2	K3	K4	WEIGHT	EIGEN	RASIO
KRITERIA	K1	K2	K3	K4	K1	0,4800	0,5217	0,4615	0,4000	0,4658	1,8872	4,0513
K1	1	2	3	4	K2	0,2400	0,2609	0,3077	0,3000	0,2771	1,1201	4,0416
K2	0,50000	1	2,00	3	K3	0,1600	0,1304	0,1538	0,2000	0,1611	0,6469	4,0160
K3	0,33333333	0,5	1	2	K4	0,1200	0,0870	0,0769	0,1000	0,0960	0,3853	4,0152
K4	0,25000	0,33333333	0,5	1	jumlah	1	1	1	1	1	average	4,0310
JUMLAH	2,08333	3,83333333	6,5	10							CI	0,0103
kedaulatan 4x lebih penting dari stabilitas											CR	0,0115 < 0,1 konsisten
kedaulatan 3x lebih penting dari intensitas kejadian												
kedaulatan 2x lebih penting dari dampak ekonomi												
Dampak Ekonomi 2x lebih penting dari pada intensitas kejadian												
Dampak Ekonomi 3x lebih penting dari pada stabilitas regional & global												
Intensitas kejadian 2x lebih penting dari pada stabilitas												
PERANGKAPAN ALTERNATIF					BOBOT GAB	P1	P2	P3	BOBOT KRITERIA			
K1	0,2973	0,1638	0,5390	0,4658	K2	0,5390	0,2973	0,1638	0,2771			
K2	0,2973	0,5390	0,1638	0,1611	K3	0,2973	0,1638	0,5390	0,0960			
K3	0,2973	0,1638	0,5390	0,0960	K4	0,2973	0,1638	0,5390	0,0960			
RANGKING	0,3642	0,2612	0,3746									
	2	3	1									

Gambar 3 hasil perhitungan pembobotan AHP (sumber: olahan peneliti)

Hasil ini menunjukkan bahwa Malaysia merupakan aktor negara dengan potensi ancaman terbesar di ALKI II. Ancaman terutama muncul dari isu illegal fishing, tumpang tindih klaim maritim, serta potensi gesekan perbatasan laut. Amerika Serikat berada di posisi kedua karena aktivitas militernya dalam menjaga kebebasan navigasi, yang dapat menimbulkan ketegangan dengan negara lain. Australia menempati posisi ketiga, lebih sebagai pengguna ALKI II untuk kepentingan logistik dan operasi regional.

Temuan AHP menegaskan bahwa tidak semua ancaman memiliki bobot yang sama. Malaysia, meskipun negara tetangga dekat, justru dipersepsikan sebagai aktor dengan ancaman tertinggi karena sering bersinggungan langsung dengan kepentingan Indonesia di laut. Sementara itu, Amerika Serikat dan Australia lebih berperan dalam dinamika geopolitik kawasan. Hasil ini menunjukkan pentingnya diplomasi proaktif dengan Malaysia, diimbangi penguatan patroli dan penegakan hukum di perbatasan, agar potensi konflik dapat diredam sejak dini.

Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi berdasarkan kekuatan internal (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Pendekatan ini membantu melihat ALKI II secara lebih komprehensif, bukan hanya dari sisi ancaman, tetapi juga potensi yang dapat dimanfaatkan.

Menurut David & David (2017), analisis SWOT untuk mengidentifikasi *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) dari faktor internal, serta *Opportunities* (peluang) dan

Threats (ancaman) dari faktor eksternal. Hasilnya dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi yang realistis dan berdaya saing.

Strength (S).

- 1) (S1) Letak Geografis
- 2) (S2) Legalitas internasional UNCLOS
- 3) (S3) Keberadaan TNI dan Bakamla
- 4) (S4) Diplomasi Maritim

Weakness (W).

- 1) (W1) Keterbatasan Armada dan teknologi
- 2) (W2) Koordinasi antar instansi maritim belum optimal
- 3) (W3) Infrastruktur belum optimal sepanjang ALKI II
- 4) (W4) Anggaran pertahanan terbatas

Opportunity (O).

- 1) (O1) Peningkatan kerjasama keamanan maritim regional dan global
- 2) (O2) Perkembangan teknologi maritim (satellite surveillance, drone, AI).
- 3) (O3) Pertumbuhan Injasmart
- 4) (O4) Dukungan Hukum internasional

Threats (T).

- 1) (T1) Revalitas geopolitik
- 2) (T2) Aktivitas Illegal fishing
- 3) (T3) Penyelundupan narkoba,
- 4) (T4) Potensi terorisme

Kemudian melaksanakan perhitungan SWOT dengan melaksanakan pembobotan dan menentukan rating sehingga ditemukan SWOT seperti tabel berikut:

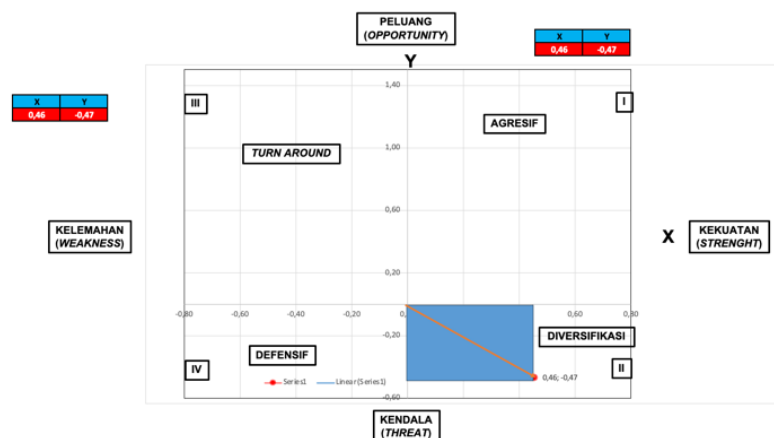
Tabel 1. Faktor Ifas SWOT

NO	IFAS	Bobot	Rating	Skor
S	STRENGTH			
1.	(S1) Letak geografis	0,22	4	0,807
2.	(S2) Legalitas Internasional UNCLOS 1982	0,20	3	0,667
3.	(S3) TNI AL dan Bakamla Garda Maritim	0,21	4	0,735
4.	(S4) Diplomasi Maritim	0,19	3	0,602
	Total Strength			2,810
W	WEAKNESS			
1.	(W1) Keterbatasan Armada & Teknologi	0,20	3	0,667
2.	(W2) Koordinasi antar instansi belum optimal	0,18	3	0,540
2.	(W3) Infrastruktur belum merata sepanjang ALKI II	0,17	3	0,482
3.	(W4) Anggaran pertahanan terbatas	0,20	3	0,667
	Total Weaknesses			2,355
	TOTAL	1,570		

Tabel 2. Faktor Efas SWOT

NO	EFAS	Bobot	Rating	Skor
O	OPORTUNITY			
1.	(O1) Peningkatan Kerjasama keamanan maritim	0,19	3	0,590
2.	(O2) Perkembangan teknologi maritim(satelit surveillance, drone)	0,20	3	0,654
3.	(O3) Pertumbuhan Injasmart	0,20	3	0,654
4.	(O4) dukungan hukum internasional	0,19	3	0,590
	Total Opportunities			2,487
T	THREATS			
1.	(T1) Revalitas geopolitik	0,20	3	0,65
2.	(T2) Aktifitas illegal fishing	0,22	4	0,79
2.	(T3) Penyelundupan narkoba, perdagangan manusia	0,22	4	0,79
3.	(T4) potensi terorisme maritim dan perompakan	0,21	4	0,72
	Total Threats			2,956
	TOTAL	1,598		

Dari table perhitungan diatas diketahui bahwa strategi yang tepat adalah pada kuadran II S-T yaitu dengan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4 Kuadran SWOT

Dengan berada di Kuadran II, strategi ALKI II harus menekankan pemanfaatan kekuatan internal seperti posisi geografis strategis, keberadaan TNI AL dan Bakamla, serta dukungan diplomasi maritim. Kekuatan ini perlu digunakan untuk menghadapi ancaman serius berupa rivalitas geopolitik, kejahatan transnasional, illegal fishing, hingga potensi terorisme maritim. Pendekatan ST berarti Indonesia harus defensif-aktif, yakni tidak hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga menginisiasi langkah-langkah strategis agar ancaman tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dengan demikian, kekuatan yang dimiliki bangsa digunakan secara optimal untuk menjaga ALKI II sebagai jalur vital global sekaligus simbol kedaulatan maritim Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa ALKI II memiliki arti vital tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas regional dan global. Sebagai jalur penghubung Samudra Hindia dan

Pasifik, ALKI II adalah urat nadi perdagangan dunia yang sekaligus membuka ruang munculnya berbagai ancaman strategis.

Analisis NKKK memperlihatkan bahwa ancaman muncul karena adanya niat aktor, didukung kemampuan, diperkuat oleh kondisi lingkungan strategis, serta dimudahkan oleh kerawanan internal. Pendekatan DIME-FIL menunjukkan bahwa instrumen kekuatan nasional diplomasi, informasi, militer, ekonomi, keuangan, intelijen, dan penegakan hukum harus berjalan secara terpadu. Konsep Sea Power A.T. Mahan menegaskan pentingnya armada, pangkalan, dan industri maritim sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

Melalui metode AHP, Malaysia muncul sebagai aktor dengan bobot ancaman tertinggi (0,3746), disusul Amerika Serikat (0,3642), dan Australia (0,2612). Hasil ini menekankan bahwa ancaman tidak selalu datang dari kekuatan global, tetapi juga dari negara tetangga yang bersinggungan langsung dengan kepentingan maritim Indonesia. Analisis SWOT menempatkan ALKI II pada Kuadran II S-T, yang berarti strategi terbaik adalah memanfaatkan kekuatan internal Indonesia untuk menghadapi ancaman eksternal melalui pendekatan defensif-aktif.

Keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa penguatan ALKI II tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan sinergi antara pertahanan militer, diplomasi internasional, penguatan ekonomi maritim, penegakan hukum, serta pembangunan budaya maritim di tengah masyarakat.

5. REFERENSI

- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." (2004).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- United Nations. United Nations convention on the law of the sea. Nova Science Publishers, Incorporated, 2008
- Singer, The Correlates of War: Testing Some Realpolitik Models.153
- Rodriguez, Cesar Augusto, Timothy C. Walton, and Hyong Chu. "Putting the "fil" into "dime": growing joint understanding of the instruments of power." Joint Force Quarterly 97, no. 8 (2020)
- A T Mahan, The Influence of Sea Power Upon History 1660–1783 (Boston: Dover Publication, 1989).29